PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA (DLHK) PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DIO RIVALDO

02011181621013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDARALAYA

NAMA	: DIO RIVALDO
NIM	: 02011181621013
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

"PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) KOTA PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA"

Secara Substansi Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakulltas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, ...2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.
NIP. 195702211988032002

Pembimbing Pembantu,

M. Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198908242015041003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: DIO RIVALDO
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621013
Tempat/Tanggal Lahir	: PALEMBANG, 11 MARET 1998
Fakultas	: HUKUM
Strata Pendidikan	: S1
Bagian/Program Khusus	: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, ... 2021



Dio Rivaldo
NIM. 02011181621013

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

SKRIPSI YANG BAIK ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI

- Kalangan Mahasiswa

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Orang Tua Tercinta**
- **Istri Tercinta & Mertuaku**
- **Dosen dan Guru-Guruku**
- **Organisasiku dan Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) KOTA PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**". Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiiin.

Palembang, 2021

Penulis,

Dio Rivaldo
NIM. 02011181621013

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. **Allah SWT** dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Teristimewa kedua orang tua tercinta ayah Hariyanto S.Pd., M.Si dan ibunda Salomah** yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam mendidik dan membimbing anaknya, dan yang tiada hentinya mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya terutama penulis hingga saat ini, terimakasih atas segalanya Ayah dan Ibu .
3. **Istri tersayang Rahmah Arliyani** yang telah memberikan motivasi dan semangat tersendiri, **serta ayah mertua H. Syahabudin dan mama Hj. Jamilah** yang telah memberikan dorongan cinta dan moril.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE**. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Dr. Mada Apriandi Zuhri, S.H., MCL**. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu **Dr. Iza Rumesten RS, S.H,, M.Hum.** Selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara.
10. Ibu **Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Bapak **M. Zainul Arifin, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini.
12. **Segenap Dosen dan Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu serta pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
13. **Segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** serta orang-orang hebat di dalamnya terima kasih atas pengalaman organisasi dan menjadi tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini.
14. Rekanda-rekanda seperjuangan **Rangga, Titok, Nurdin, Budi, Putak, Iqbal dan Hafiz Mandala** yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi in. ***Thank You!***

15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Dio Rivaldo
NIM. 02011181621013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

HALAMAN PENGESAHAN ..…..……. ii

SURAT PERNYATAAN ……...……...……. iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……. iv

KATA PENGANTAR ……..……. v

UCAPAN TERIMAKASIH ……...……... vi

DAFTAR ISI ..…….. viii

ABSTRAK ……...…….…….. xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang ……...……... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Ruang Lingkup..... 8

F. Kerangka Teori..... 9

1. Konsep Negara Hukum……...……...……... 9
2. Konsep Otonomi Daerah……...……..…… 11
3. Teori Kewenangan…...……...……. 13
4. Teori Pengawasan……...…...…….. 16

G. Metode Penelitian..... 18

1. Jenis Penelitian……...……. 18
2. Metode Pendekatan…….. 19
   a. Pendekatan Undang-Undang…….…….. 19
   b. Pendekatan Sosiologis……. 19
   c. Pendekatan Kasus……;…….. 20
3. Sumber Data Hukum……...…… 20
4. Teknik Pengumpulan Data……..…… 22
5. Lokasi Penelitian……. 24
6. Teknik Analisa Data……..…….. 24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan…….…… 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……. 25

A. Pengertian Pelaksanaan ..……. 25

B. Teori Pengawasan……. 27

1. Tipe-Tipe Pengawasan……..……... 29
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan…….… 30
3. Mekanisme Pengawasan…….. 30
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan…….… 31
5. Proses Pengawasan Pemerintah……... 32
6. Tahap-Tahap Pengawasan …….. 33
7. Syarat-Syarat Pengawasan……... 34

8. Fungsi-Fungsi Pengawasan……..…… 36

C. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang……. 37

1. Sejarah DLHK Kota Palembang……...….... 37

2. Visi dan Misi DLHK Kota Palembang……. 38

3. Arah Strategi dan Kebijakan DLHK Kota Palembang……. 40

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLHK Kota Palembang……. 41

5. Sumber Daya DLHK Kota Palembang……. 44

D. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga……..……. 45

1. Tujuan Pengelolaan Sampah…...……...…….. 48

2. Klasifikasi Pengelolaan Sampah…...……... 50

a. Berdasarkan Sumber Sampah ……..……. 51

b. Berdasarkan Komposisi Sampah …….. 52

c. Berdasarkan Proses Terjadinya Sampah ……... 52

d. Berdasarkan Karakteristik sampah …… 53

e. Berdasarkan Macam-Macam Sampah ……... 53

f. Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sampah …… 54

g. Dampak Jika Sampag Tidak Dikelola …… 55

3. Tugas Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah……...……. 56

4. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah…….…….……... 58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…..…… 54

A. Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan DLHK

Kota Palembang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga…… 54

1. Pengurangan Sampah …….. 62

2. Penanganan Sampah ……..……. 67

a. Pemilahan ……..…. 69

b. Pengumpulan …….. 70

c. Pengangkutan ……. 72

d. Pengolahan ……. 75

e. Pemrosesan Akhir …….. 77

B. Impelementasi Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah

Tangga.....…….... 72

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana ……..……. 80

2. Kesadaran Masyarakat …… 82

3. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir …….. 83

BAB IV PENUTUP……...…….. 87

A. Kesimpulan……...……..... 87

B. Saran……...…….. 89

DAFTAR PUSTAKA…..……...…….... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : **Dio Rivaldo**
NIM : **02011181621013**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Berbicara mengenai pengelolaan sampah secara implementatif menjadi tanggungjawab dari DLHK Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan DLHK Palembang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan hambatan DLHK Palembang dalam mengimplementasikan Perda No. 3 Tahun 2015. Metode yang digunakan penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHK Kota Palembang dalam pengelolaan sampah diukur dalam indikator pelayanan dinyatakan sudah sesuai dengan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Faktor Hambatan bagi DLHK Kota Palembang dalam mengimplementasikan Perda No.3 Tahun 2015 yaitu kondisi 121 armada angkutan sampah, 60 persennya butuh peremajaan. Dikarenakan usianya yang sudah tua, sebagian sudah rusak. Selanjutnya kondisi daya tampung TPA Sukawinatan juga memprihatinkan dikarenakan sudah diambang kapasitas. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang kebersihan. Sedangkan faktor pendukung yaitu telah tercapainnya target penyediaan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pegolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di setiap kecamatan. Serta sosialisasi yang terus dilakukan DLHK Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2015.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Kewenangan, DLHK Kota Palembang, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.*

Palembang, ... November 2021
Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Hj. Helmanida, S.H., M.Hum	**M. Zainul Arifin, S.H., M.H.**
NIP. 195702211988032002	**NIP. 198908242015041003**

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan pada dasarnya, daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai urusan pemerintah pusat.[1]

Merujuk pada penjelasan konstitusi di atas penulis perjelas bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dipegang atau dikuasai oleh presiden meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah didefinisikan sebagai berikut:[2] Otonomi Daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di atas penulis interpretasikan bahwa otonomi daerah adalah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kemudian mengurus

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

[2] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (6).

rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asal-usul pengertian "otonomi" secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. berdasarkan pemahaman ini, otonomi dapat diartikan sebagai pengundangan sendiri (*zelfwetgeving*) atau pemerintahan sendiri (*zelfbestuurs*)[3]

Merujuk kepada pendapat diatas, penulis pahami bahwa konsep asal-usul dari otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau membuat peraturan di daerah sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang menetap dan tinggal pada batas wilayah tertentu.

Tujuan otonomi daerah menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem bernegara.[4]

> Rasionalitas dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah sendiri menurut penulis yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dari pemerintah kabupaten dan kota agar semakin baik, dengan adanya prinsip otonomi maka kabupaten dan kota dapat memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kondisi aspirasi dan potensi daerah, dengan demikian pemerintah kabupaten dan kota diharapkan menjadi lebih efektivitas dan efisiensi serta responsif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang berkembang dan timbul di daerahnya.

---

[3]Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta,1987. hlm. 9.

[4] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah sebagai konsekuensi atas diterapkannya sistem desentralisasi dalam sistem pemerintahan. Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah definisi desentralisasi yaitu: "penyerahan urusan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Asas Otonomi".[5]

Asas Desentralisasi sendiri penulis maknai sebagai asas hukum yang menjadi perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencapai pengurangan terhadap tumpukan pekerjaan di pusat pemerintahan dan dalam keadaan tertentu atau menghadapi permasalahan mendesak pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat.

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.[6] Namun, pemerintah daerah juga berwenang atas kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayahnya masing-masing, dengan catatan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.[7]

Merujuk pada uraian peraturan di atas bahwa kebijakan dan strategi dari pemerintah daerah Kota Palembang harus dirancang dan disahkan dengan cara yang tidak bertentangan terhadap kebijakan Provinsi yang ada, dan selanjutnya kebijakan Provinsi sendiri harus disesuaikan dan dibuat dengan mengacu atau tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya yaitu pemerintah pusat.

---

[5] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (8).

[6] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7 huruf a.

[7] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a.

Indonesia hingga saat ini masih sulit mengatasi permasalahan sampah terlebih adanya kecenderungan wilayah perkotaannya yang memiliki jumlah penduduk yang banyak termasuk didalamnya penduduk tidak tetap yang melampaui daya dukung lingkungan sehingga jumlah sampah yang dihasilkan banyak pula.[8]

Berdasarkan uraian mengenai penduduk diatas menurut penulis dapat dipisahkan menjadi penduduk tetap dan tidak tetap, penduduk tetap adalah penduduk bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu hingga kurun waktu tidak terbatas. Sedangkan penduduk tidak tetap adalah penduduk yang berpindah tempat dikarenakan pekerjaan hingga kurun waktu tertentu saja.

Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. luas wilayah 400,61 km² dihuni oleh 1,8 juta penduduk pada 2019. Diprediksikan pada tahun 2030 akan dihuni 2,5 Juta orang. Kota Palembang juga kota terpadat di Sumatera, setelah Medan dan sebagai kota terpadat kesembilan di Indonesia.[9]

Jumlah penduduk Kota Palembang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang bahwa agregat kependudukan perkecamatan Kota Palembang dari tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya terhadap jumlah penduduk tersebut, berikut rincian jumlah penduduk Kota Palembang di data perkecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:[10]

---

[8] Yohana Eveline Sinaga, *Intensitas Pengawasan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Kota Surabaya*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2/No. 1/Januari/2014, hlm. 1.

[9] Kusnadi, *Penduduk Palembang Terpadat di Sumsel*, https://infopublik.id/kategori/nusantara/504647/penduduk-palembang-terpadat-di-sumsel diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 15.32 WIB

[10] Palembang, https://palembangkota.bps.go.id/indicator/12/167/1/jumlah-penduduk-palembang.html diakses pada 16 Desember 2020 Pukul 23.50 WIB

Tabel 1.1
Data Statistik Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Perkecamatan
Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2017, 2018 dan 2019

No.	**Kecamatan**	**2017**	**2018**	**2019**
1	Ilir Barat II	71 267	72 387	73 269
2	Seberang Ulu I	91 619	93 013	95 251
3	Seberang Ulu II	104 209	105 815	107 101
4	Ilir Barat I	137 863	139 933	141 545
5	Ilir Timur I	77 102	78 314	79 269
6	Ilir Timur II	93 352	94 810	97 000
7	Sukarami	155 590	156 509	158 246
8	Sako	91 754	92 301	93 326
9	Kemuning	91 419	92 846	93 998
10	Kalidoni	111 030	111 691	112 931
11	Bukit Kecil	48 874	49 657	50 301
12	Gandus	64 020	64 994	65 781
13	Kertapati	89 597	90 978	92 082
14	Plaju	88 265	89 643	90 735
15	Alang-alang Lebar	96 886	97 455	98 537
16	Sematang Borang	35 821	36 033	36 445
	Total	**1 623 099**	**1 643 488**	**1 662 893**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Berlandaskan data tabel diatas penulis simpulkan bahwa penduduk Kota Palembang saat ini memiliki penduduk yang cukup dikatakan padat dilihat pada angka terakhir di tahun 2019 sebesar 1.662.893 jiwa. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palembang khususnya dalam mengelola permasalahan sampah atas pelayanan yang baik terhadap penduduknya.

Satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus diberikan kewenangan dalam melakukan penyelengaraan pengelolaan sampah di Kota Palembang sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.[11]

Berdasarkan peraturan di atas, menurut penulis diperlukan adanya penyelengaraan pengelolaan sampah yang berskala kota sesuai dengan ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan di Kota Palembang yang bertujuan menyelaraskan pembangunan Kota Palembang sesuai visi misi Kota Palembang yaitu mewujudkan "Palembang Emas Darussalam".

Berangkat dari uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**"

[11] Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang terhadap pengelolaan sampah rumah tangga?

2. Apakah Faktor Hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam Implementasi Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan kewenangan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa Faktor Hambatan bagi DLHK Kota Palembang dalam Implementasi Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat demi kepentingan teoritis dan kepentigan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya administrasi negara, olehnya didalam penelitian ini terdapat kajian-kajian hukum administrasi negara, yaitu tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, penelitian ini juga dapat menambah refrensi dan pengetahuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai saran atau rekomendasi kepada pembuat kebijakan publik serta memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan kajian dalam Hukum Administrasi Negara ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta sebagai pemenuhan pelayanan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum, di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: "Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi". Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang dijelaskan sebagai berikut: "Negara Indonesia adalah negara hukum".[12]

Berlandaskan bunyi peraturan di atas, maka Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum dan memiliki sebuah puncaknya yaitu adanya sistem bentuk konstitusi atau UUD 1945 dalam mencapai keputusan yang objektif baik dari pihak pemerintah maupun keterlibatan rakyatnya.

Menurut Aristoteles, memerintah dalam negara hukum sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.[13]

Tunduk pada pendapat ahli sebelumnya, penulis artikan bahwa konsep negara hukum dapat dipahami bahwa rakyat memiliki kedaulatan atas

[12] Pasal 3 ayat 1 UUD Tahun 1945

[13] Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pcngantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi HTN, FH UI, Jakarta, 1976, hlm. 75.

setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma pada rakyat, agar mereka menjadi warga negara yang baik, dan peraturan hukum yang dibuat harus mencerminkan keadilan.

> Konsep negara hukum selanjutnya, menurut pendapat D. Muthiras adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang–orang tetapi oleh Undang–undang Sedangkan menurut Seopomo negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan.[14]

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara disamping memiliki kewajiban dalam hidup bernegara agar tidak sewenang-wenang dan harus taat dengan ketentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama aturan tersebut memihak kepada masyarakat itu sendiri.

> Timbulnya konsep negara hukum (*rechtstaat*) di negara-negara Eropa Kontinental merupakan reaksi atas lahirnya teori tujuan negara yang kemudian menimbulkan kekuasaan yang otoriter/absolut. Golongan yang memiliki paham liberal dalam hal ini berusaha untuk membatasi kekuasaan raja-raja yang absolut dan menegakan kebebasan dari setiap warga untuk mencari kemakmuran sendiri hal ini sebagai cermin atas adanya sifat individualistis dari paham liberal.

Immanuel Kant, seorang filsuf bangsa Jerman Teori negara hukum yang dikemukakan oleh Kant dikenal sebagai negara hukum liberal, yang

[14] Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24-25.

mengandung dua unsur penting, yaitu:[15] Perlindungan hak asasi manusia dan Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia akan mendapat perlindungan.

Bersandarkan pada beberapa uraian pendapat dari para ahli di atas akan digunakan penulis untuk menganalisa pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, dalam penyelengaraan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Kota Palembang.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: "Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Pasal 18 UUD Tahun 1945, menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan (*eenheidsstaat*), Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara (*staat*).

Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek*

[15] Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, Cet. 2, hlm. 38.

atau bersifat administratif, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. [16]

Berdasarkan uraian di atas, Otonomi daerah diyakini sebagai suatu pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1 otonomi daerah adalah:[17] "Hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut penulis desentralisasi adalah suatu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi yang diikuti dengan otonomisasi masyarakat yang berada di wilayah tertentu, merupakan pancaran kedaulatan rakyat karena otonomi sesungguhnya diberikan kepada masyarakat agar dapat

[16] Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 2.

[17] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

memecahkan berbagai masalah lokalitas untuk tercapainya kesejahteraan setempat.[18]

Berdasarkan rumusan pendapat ahli di atas akan dipergunakan penulis untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah kota Palembang.

3. Teori Kewenangan

Menurut Hassan Shadhily, menerjemahkan wewenang *(authority)* sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang di inginkan.[19]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami kewenangan bukan hanya sebagai sumber kekuatan melainkan adalah sebagai hak yang dapat dipakai oleh seseorang yang berwenang untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan setiap kewajiban agar tercapai tujuan-tujuan tertentu yang telah direncanakan.

> Dalam ilmu hukum publik, wewenang memiliki hubungan dengan kekuasaan, yang mana kekuasaan itu sendiri memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif maupun Yudisial adalah suatu kekuasaan formal. Selain memiliki unsur essensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan memiliki unsur-

[18] Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No. 1/Vol.1/Juli/2000, Hlm. 37.

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

> unsur lain diantaranya hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijakbestarian dan yang terakhir kebajikan.[20]

Berlapiskan pada uraian diatas, agar kekuasaan bisa dimanfaatkan maka dibutuhkan adanya penguasa atau organ, sehingga negara tersebut dapat dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan dimana jabatan-jabatan tersebut di isi oleh para pejabat yang nantinya akan mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan dari konstruksi subjek kewajiban.

Memahami kewenangan sendiri terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah lingkup tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan, tidak hanya membuat keputusan pemerintah saja, tetapi meliputi dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang, juga serta distribusi wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[21]

Berdasarkan pemahaman diatas, penulis memaknai definisi kewenangan harus didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan sumber kewenangan yang sah. Dengan begitu, pejabat organ/intitusi pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Ahli Hukum Administrasi Negara Stroink mengemukakan bahwa sumber dari kewenangan dapat di peroleh bagi mereka setiap pejabat atau organ/institusi pemerintahan dengan melalui beberapa cara, yakni dengan

---

[20] Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta. 1998, hlm 37-38.

[21] Indroharto, *Asas-Asas Umum Peemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1994. Hlm 65.

cara-cara yang telah diatur meliputi sumber kewenagan atribusi, delegasi dan juga mandat.

Kewenangan organ/institusi pemerintah sendiri adalah suatu kewenangan yang ditopang oleh hukum positif yang berlaku yang berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan hal tersebut. Tanpa adanya kewenangan tentu tidak dapat dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar benar.[22]

Merujuk dari penjelasan ahli diatas, penulis berpendapat bahwa dalam memperoleh kewenangan atau kekuasaan dapat diperoleh melalui atribusi yaitu melalui pembagian kekuasaan negara (eksekutif) oleh UUD 1945/Konstitusi Negara. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat dapat diperoleh atas adanya pemindahan atau pelimpahan kewenangan yang ada.

Berprinsipkan rumusan teori diatas akan dipergunakan penulis sebagai acuan untuk menganalisa pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah kota Palembang.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau

[22] F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 219.

mengarahkan.[23] Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:[24] Pengawasan berasal dari kata "Awas" yaitu penilikan atau penjagaan.

> Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar atas manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.[25] Sedangkan menurut Sujanto, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[26]

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan proyek konstruksi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.

> Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, menyatakan yaitu:[27] Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk

---

[23] Admin, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengawasan diakses pada tangggal 09 Juni 2021 pukul 00. 20 WIB.

[24] Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Ke III*, https://kbbi.web.id/pengawasan. diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 00.14 WIB

[25] Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 21-22.

[26] Sujanto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53.

[27] Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (4).

> menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas penulis definisikan pengawasan adalah sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan fungsional. Pengawasan hirarki berarti dilakukan oleh otoritas lebih tinggi. sedangkan Pengawasan fungsional dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).[28]

> Berlandaskan penjelasan diatas, dalam lembaga pemerintahan selanjutnya, Pengawasan internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Pengawasan internal dapat menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan dalam rangka perbaikan atau peningkatan kinerja. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah organisasi, kinerja pegawai berkaitan dengan tugas yang diatur oleh suatu kebijakan atau peraturan.

Tunduk pada definisi pengawasan, baik yang didefinisikan para sarjana, maupun yang diatur dalam peraturan pada dasarnya saling melengkapi. Karena hakekat dari pengawasan dalam penyelenggaraan

---

[28] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

Pemerintahan Daerah, jelas bahwa pengawasan di orientasikan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif.

Berprinsipkan pada rumusan teori diatas akan dipergunakan penulis sebagai acuan untuk menganalisa pelaksanaan kewenangan pengawasan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah kota Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.[29]

Berdasarkan ketentuan jenis penelitian diatas yaitu suatu penelitian yang akan meneliti peraturan perundang-undangan hukum yang kemudian digabungkan dengan data-data dan perilaku yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*)

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, Hlm 51.

Berdasarkan metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua bentuk Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan issue hukum yang sedang ditangani. Hasil yang ditelaah tersebut diharapkan merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[30]

Penulis perlu memahami hirarki, asas-asas hukum, dilakukan dengan melihat permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang lain dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang didasarkan untuk memahami dan mempelajari hidup bersama dalam bermasyarakat sehingga memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam penormaan atas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

c. Pendekatan Kasus

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 133.

Berdasarkan metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan upaya untuk menelaah latar belakang atas suatu permasalahan kasus yang terjadi dan perkembangan atas isu-isu yang sedang dihadapi.[31]

> Berlandaskan penjelasan di atas pendekatan kasus dalam penelitian ini penulis akan menganalisis untuk dapat menjelaskan secara komprehensif terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga hal ini dalam rangka pemenuhan pelayanan publik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

3. Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat.

b. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data sekunder di bidang

[31] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Group, Surabaya, hlm. 94.

hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan[32]

Bahan Hukum primer terdiri dari atas aturan yang berkaitan dengan issue hukum yang penulis sampaikan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
b) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
g) Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
h) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.141

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat dari ahli/pakar hukum dan Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan atas objek penelitian.[33]

3) Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder meliputi berita, majalah dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain :

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak pada objek penelitian yang akan penulis lakukan dengan mendatangi

[33] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.106

langsung lokasi penelitian yang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[34]. wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan dijawab secara lisan dengan sejumlah para informan.

Berdasarkan dengan informan seperti disebutkan di atas, maka menurut L.J. Moleong mengemukakan: "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian".[35]

Berdasarkan penjelasan ahli diatas, yang menjadi ciri-ciri informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung atau di pandang telah mengetahui dan memahami tentang hal-hal berkaitan erat dengan masalah penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

[34] Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT Asumber daya insani Mahasatya, Jakarta, Cet. 4, hlm. 39.

[35] Maleong, Lexy J, 2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 90.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Berlokasi di Jalan Sukarela Nomor 129 A, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153, Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Mengenai data-data atau gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.[36]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis telaah isi ataupun makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan didalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Merujuk kepada teknik penarikan kesimpulan menggunakan teknik secara deduktif yang artinya cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta bersifat khusus.[37]

---

[36] Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 107.

[37] Bahder Johan Nasution, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, Hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, 1987 *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press.

Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika.

Basriyanta, 2007, *Memanen Sampah,* Yogyakarta: Kanisius.

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Peemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

J.S. Slamet, 1994, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Kansil Christine, 2002, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

Koesnardi Moh. dan Ibrahim Harmaily, 1976, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Pusat Studi HTN, FH UI.

Kantaprawira Rusadi, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta.

Marzuki Mahmud Peter, 2016 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Maleong, Lexy J, 2000 Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan.* Bandung, PT. Refika Aditama.

Murtandho Djuli dan Said Gumbira, 1988, *Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat*, Jakarta: PT Melton Putra

M. Gelbert. 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart", Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup,* PPPGT/VEDC: Malang,

Nurcholis Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo.

Nasution Johan Bahder, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.

Nugraha Safri, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: FH UI.

Ridwan Juniarso & Sudrajat Sodik Ahmad. 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

Sucipto Dani Cecep, 2009, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta: Goysen Publishing.

Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Santoso Sastropoetro, 1982, *Pengertian Pelaksanaan*.

SP. Siagian, 1984, *Metode-Metode Perencanaan*.

Safri Nugraha, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, FH UI.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penulis PS, 2011, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Bogor: Penebar Swadaya.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Wintoko Bambang, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

B. Jurnal

Arrauda Vioya, Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan Jakarta *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 21, No. 3, Desember 2010.

Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol.1/Juli/2000.

Erland Mouw, "Kualitas Pelayan Publik di Daerah," dalam Jurnal UNIERA No. 2/Vol. 2/Agustus/2013.

Firman L Sahwan, Joko Heru Martono, Sri Wahyono, dan Lies A Wisoyodharmo, Sistem Pengelolaan Libah Plastik di Indonesia, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 6, No. 1, 2011.

Hijrah Purnama Putra dan Yebi Yuriandala, Studi pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif, urnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Januari 2010.

Hadi Sabari Yunus dan Darma Kusuma, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan Di Kecamatan Dom Aleixo Kabupaten Dili-Timor Leste*, Jurnal Majalah Geografi Indonesia, Vol 25, No. 2, September 2011. Hlm. 168

Rosita Shochib, Pengelolaan Sampah kantor Secara Terpadu (Studi Kasus Kantor BPPT), Jurnal Rekayasa Lingkungan, Vol. 7, No. 2, Juli 2011.

Said Usman, Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 5, N0 3, November 2016.

Sri Nurhayati Qodriyatun, Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata dan Solusinya, Jurnal kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X, No. 23, Desember 2018.

Tri Kharisma Jati, Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai), Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.

Yohana Eveline Sinaga, “Intensitas Pengawasan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Kota Surabaya”Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2/No. 1/Januari/2014.

C. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Kota Palembang.

D. Dokumen

Badan Standar Nasional Indonesia SNI-19-2454-2002 Tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Badan Standar Nasional Indonesia SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2019

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2019

E. Internet

Feny Maulia Agustin, "*Warga Keluhkan Sampah Tak Terangkut, DLHK Palembang Bikin Program Ini*" https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustina/warga-keluhkan-sampah-tak-terangkut-dlhk-palembang-bikin-program-ini di akses pada 10 November 2020

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6017f0e66a6e9/aturan-pengelolaan-sampah-dan-solusi-permasalahan-impor-limbah/ diakses pada 07 Juni 2021

Yudiansyah, "*Pemkot Palembang Bakal Terapkan Perda Kebersihan*" diakses dari https://intens.news/pemkot-palembang-bakal-terapkan-perda-kebersihan/ di akses pada 27 Oktober 2020

Yudi Abdullah, "*Pemkot Palembang bangun tempat pengolahan sampah terpadu*" https://m.antaranews.com/berita/911639/pemkot-palembang-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu di akses pada 09 November 2020

Yudi Abdullah, *Pemkot Palembang ajak warga minimalkan penggunaaan plastik,* https://sumsel.antaranews.com/berita/512348/pemkot-palembang-ajak-warga-minimalkan penggunaaan-plastik di akses pada 10 April 2021

F. Wawancara

R.A. Sjarifudin, S.Kom, Plt. Kepala UPTD Kecamatan Seberang Ulu 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021.